

PENGEMBANGAN REKREASI ALAM DI KAWASAN HUTAN

(Outdoor Recreation Development in Forest Land)

TUTUT SUNARMINTO

*Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan, Fakultas Kehutanan IPB,
P.O. Box 168, Bogor 16001*

ABSTRACT

One of the many forest benefits, that is very potential to be developed is nature recreation service, due to the increase tendency of nature recreation demand. However, due to the difficulties to clearly see the economical benefits of tourism and recreation activities in forested land especially conservation areas, have caused few investors who are willing to involve themselves in the field of nature recreation service. According to various research, there is a great consumer surplus in outdoor recreation activities and results show increase number of visitors in a conservation areas from year to year.

PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu modal dasar dan faktor dominan bagi pembangunan nasional yang sangat potensial, sehingga harus dapat dimanfaatkan secara rasional dengan memperhatikan kebutuhan generasi masa kini dan masa mendatang. Fungsi dan manfaat yang dapat diperoleh dari sumberdaya alam hutan di antaranya adalah perolehan devisa negara yang besar dan peningkatan kesejahteraan rakyat kecil sekitar hutan.

Devisa negara dari ekspor kayu olahan meningkat terus dari tahun ke tahun. Bila pada tahun 1989 nilai ekspor kayu olahan sebesar 3,71 milyar \$US, maka pada tahun 1993 menjadi 5,30 milyar \$US. Nilai ekspor ini diperoleh dari pengolahan hutan produksi yang luasnya sekitar 64 juta ha atau sekitar 42,74% dari luas total hutan Indonesia (Departemen Kehutanan, 1994).

Sejauh ini perhatian terhadap hutan produksi sebagai penghasil devisa negara yang berarti yang memiliki peran besar dalam pembangunan ekonomi nasional masih melebihi perhatian terhadap kawasan hutan lainnya. Namun demikian sejak tahun 1980 diakui adanya peranan pariwisata dan rekreasi di kawasan konservasi, khususnya taman nasional, dalam pembangunan ekonomi. Menurut Departemen Kehutanan Republik Indonesia (1989) dalam Susmianto (1995) rata-rata kunjungan wisatawan domestik di taman nasional dari tahun 1984/1985 - 1988/1989 meningkat 18 persen per tahun, sedangkan wisatawan mancanegara meningkat 47 persen per tahun. Namun demikian menurut *World Bank* (1994) dalam Susmianto (1995), adalah sulit untuk melihat secara cermat sejauh mana keuntungan ekonomi dari aktivitas pariwisata dan rekreasi di taman nasional. Hal ini disebabkan keterbatasan informasi pada nilai pasarnya. Kondisi demikian memberikan suatu kesulitan bagi para pembuat perencana dan keputusan dalam pengelolaan rekreasi di kawasan konservasi, khususnya taman nasional, sebagai sumber penghasil penerimaan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat sekitar.

Kesulitan dalam memprediksi penerimaan dari kegiatan pariwisata dan rekreasi di kawasan konservasi, terutama

penerimaan yang diperoleh bagi pengelola memberikan implikasi yang berakibat mengurangi minat para investor. Dalam hal ini para investor masih memandang kesertaannya dalam pengelolaan kawasan konservasi untuk dijadikan suatu unit usaha ekonomi belum merupakan suatu bentuk investasi yang menarik.

Telaahan yang lebih seksama terhadap aspek ekonomi wisata alam di kawasan hutan, khususnya konservasi, merupakan suatu keharusan untuk segera dilakukan. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang lebih memberikan penekanan terhadap pelestarian sumberdaya alam hutan dalam pengelolaannya di masa-masa mendatang. Di sisi lain sudah menjadi suatu keyakinan bahwa sebenarnya pengembangan kegiatan pariwisata dan rekreasi di kawasan hutan akan mampu memberikan kontribusi yang sangat besar.

KAWASAN KONSERVASI

Kawasan konservasi Indonesia menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dibagi atas Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Kawasan Suaka Alam (KSA). Kawasan Pelestarian Alam (KPA) terdiri dari Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (THR) dan Taman Wisata (TW), sedangkan KSA terdiri dari Cagar Alam (CA), Suaka Margasatwa (SM) dan Cagar Bioster (CB). Luas kawasan konservasi ini menurut Tataguna Hutan Kesepakatan (TGHK) sekitar 19 juta Ha atau sekitar 13,53 persen dari luas total hutan Indonesia.

Kegiatan penunjukan dan penetapan kawasan konservasi terus ditingkatkan, sehingga realisasinya dalam Pelita V mencapai 18,10 juta ha, yang terdiri dari kawasan konservasi darat seluas 15,40 juta ha (85,08%) dan kawasan konservasi laut seluas 2,70 juta ha (14,92%). Berkaitan dengan ini sampai dengan tahun 1992/1993 telah ditunjuk 31 lokasi TN seluas 7,90 juta ha, 12 lokasi Taman Laut (TL) seluas 0,15 juta ha, 14 lokasi Taman Buru (TB) seluas 0,24 juta ha dan 7 lokasi THR seluas 0,21 juta ha. Dalam hal tersebut, TN Komodo dan

TN Ujung Kulon telah dipilih menjadi *World Heritage Sites* oleh UNESCO (Departemen Kehutanan, 1994). Di samping itu secara khusus sampai dengan Pelita V tercatat 70 lokasi Taman Wisata (TW) seluas 0,23 juta ha.

Kawasan konservasi sesuai dengan fungsinya sebenarnya mempunyai peranan ekonomi yang tinggi. Namun demikian mengingat berbagai pemanfaatannya yang bersifat tidak nyata secara ekonomi maka seolah-olah tidak mempunyai nilai ekonomi. Selain itu menurut Dixon dan Sherman (1990) beberapa karakteristik manfaat dari kawasan konservasi menyebabkan kesulitan dalam memberikan nilai manfaatnya.

Ciri-ciri tersebut meliputi :

- (1) Untuk memperoleh manfaat kawasan konservasi, seperti udara nyaman, air yang jernih, dan sebagainya tidak memerlukan persaingan,
- (2) manfaat dari kawasan konservasi dapat diterima atau dirasakan oleh siapa saja, baik yang dekat maupun jauh dari kawasan, dan
- (3) manfaat dari kawasan konservasi mengandung suatu ketidakpastian, yaitu banyak dari kandungan suatu kawasan konservasi yang belum dapat ditentukan pemanfaatannya, terutama dalam jangka pendek.

Darusman (1995) mengemukakan bahwa TN Gunung Gede Pangrango menyediakan air dengan nilai manfaat sebesar Rp 4.341 milyar yang menurut penggunaannya terbagi atas manfaat air rumahtangga senilai Rp 4.181 milyar dan untuk kepentingan pertanian senilai Rp 160 milyar. Dengan nilai manfaat tersebut terdapat surplus konsumen sebesar Rp 4.248 milyar rupiah, yaitu terdiri dari surplus konsumen untuk penggunaan rumahtangga Rp 4.119 milyar dan untuk kepentingan pengairan usaha pertanian sebesar Rp 127 milyar.

Walaupun hasil penelitian di atas telah menunjukkan begitu besar manfaat kawasan konservasi, namun mengingat secara langsung masyarakat tidak mengeluarkan pengorbanan yang besar untuk menikmatinya, maka terasa manfaat tersebut sangat kecil. Di samping itu, karena manfaat di atas sifatnya tidak memberikan tambahan pendapatan, baik bagi masyarakat maupun pemerintah, maka banyak pihak yang masih menganggap nilai manfaat ekonomi dari kawasan konservasi, dalam hal ini TN Gunung Gede Pangrango, masih sangat kecil.

REKREASI ALAM

Mathieson dan Wall (1982) dalam Gunn (1993) mendefinisikan pariwisata sebagai suatu pergerakan temporer menuju suatu tempat bekerja dan tempat tinggal untuk melakukan aktivitas-aktivitas di tempat tujuan tersebut dengan keterjaminan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Dengan demikian kegiatan wisata mencakup berbagai aspek, yaitu tersedianya sarana dan prasarana transportasi, tempat menginap (hotel), tempat makan (restoran) dan tentu saja sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan wisata, seperti tempat pemancingan, pendakian, pemandangan yang indah, dan sebagainya.

Salah satu bentuk dari rekreasi adalah *outdoor recreation* yang dapat diartikan sebagai rekreasi alam terbuka, dan bahkan dapat saja disebut sebagai rekreasi alam. *Outdoor Recreation Resources Review Commission (1962) dalam Gregory (1972)* memberikan batasan rekreasi alam terbuka sebagai suatu aktivitas waktu luang di lingkungan *non-urban* yang bernuansa alami dengan tujuan utama untuk mendapatkan kesenangan dan kesegaran fisik serta mental. Selanjutnya Clawson dan Knetsch (1966) mengemukakan bahwa rekreasi alam terbuka memerlukan suatu ruang dan sumberdaya untuk berekreasi, yang tidak jarang dalam luasan dan jumlah yang besar untuk memperoleh kesenangan berekreasi tersebut.

Gregory (1972) mengemukakan bahwa rekreasi hutan merupakan salah satu bagian dari rekreasi alam terbuka. Dalam hal ini rekreasi hutan didefinisikan sebagai pemanfaatan waktu luang dengan aktivitas petualangan dalam suatu lingkungan (kawasan) hutan dengan tujuan utama untuk mendapatkan kesenangan. Biro Rekreasi Alam di Amerika Serikat pada tahun 1969 memperoleh data yang menunjukkan kegiatan-kegiatan berkemah (25,50%), *auto driving* (21,00%) dan memancing (9,10%) sebagai tiga kegiatan utama dalam aktivitas rekreasi hutan di Amerika Serikat (Gregory, 1972). Adapun Susmianto (1995) menyebutkan bahwa aktivitas rekreasi yang meliputi melihat air terjun/danau, sekedar santai, piknik dan melihat aneka satwa dan tumbuhan menempati urutan pertama dari tujuan pengunjung ke TN Gunung Gede Pangrango, yaitu meliputi 78,12%; sedangkan aktivitas mendaki dilakukan oleh 16,40% pengunjung dan sisanya (15,48%) melakukan kegiatan/studi, berkemah dan lain-lain.

NILAI EKONOMI WISATA ALAM

Bahrani (1995) mengemukakan adanya perbedaan tingkat permintaan wisata alam pada setiap kawasan konservasi yang disebabkan perbedaan potensi pasar dan potensi kawasan konservasi yang bersangkutan. Hal tersebut ditunjukkan oleh jangkauan (jarak) dan sebaran wilayah pasar serta tingkat kunjungan wisatawan dari setiap daerah asal, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor secara bersama, baik faktor-faktor yang berhubungan dengan potensi pasar maupun potensi kawasan.

Bahrani (1995) selanjutnya mengemukakan adanya perbedaan nilai manfaat wisata alam di berbagai kawasan konservasi. Dalam hal ini TN Bromo Tengger Semeru memperoleh penerimaan tertinggi dari karcis tanda masuk sebesar Rp 262.944.978/tahun yang berasal dari 210.356 pengunjung dengan harga karcis masuk Rp 1250/orang. Adapun penerimaan dari karcis masuk terendah adalah Selabintana sebesar Rp 5.282.500 yang diperoleh dari 17.608 pengunjung dengan harga karcis masuk Rp 300/orang.

Yang menarik dari penelitian Bahrani (1995) adalah adanya surplus konsumen yang demikian besar dalam kegiatan rekreasi alam di kawasan konservasi. Tabel 1 menunjukkan bahwa surplus konsumen terbesar pada kawasan rekreasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebesar Rp 2,5 milyar.

Tabel 1. Rekapitulasi pendugaan nilai manfaat wisata alam di kawasan konservasi

No.	Kawasan	Karcis masuk (Rp)	JK/thn (HOK)	Pendapatan (Rp)	TWTP (Rp)	Surplus Kons. (Rp)
I.	TN Gn Gede Pangrango	a. (aA + aB + aC)	98.637	45.796.987	240.418.648	194.621.662
		b. (bA + bB + bC)	47.710	98.736.843	167.144.379	68.407.537
A.	Cibodas	a. 500	39.688	16.843.860	102.174.156	82.330.297
		b. 2.500	19.304	84.258.902	72.895.207	24.636.306
B.	Selabintana	a. 300	17.608	5.282.500	63.420.127	58.137.627
		b. 3.000	5.246	15.737.895	37.380.968	21.643.073
C.	Situgunung	a. 500	41.341	20.670.627	74.824.365	54.153.738
		b. 1.500	23.160	34.740.046	56.868.204	22.128.158
II.	Tahura Ir. H Djuanda	a. 800	135.793	123.034.769	633.864.025	530.829.256
		b. 4.000	65.203	260.810.879	459.110.404	198.299.525
III.	HW Pananjung Pangandaran	a. 500	202.754	101.377.115	1.622.027.642	1.520.650.527
		b. 7.500	92.699	695.242.371	1.220.217.658	542.975.287
IV.	TW Grojogan Sewu	a. 1.500	103.877	72.714.108	974.866.266	902.152.159
		b. 8.000	55.426	443.408.887	765.820.157	322.411.271
V.	TN Bromo Tengger Semeru	a. 1.250	210.356	262.944.978	2.779.842.887	2.516.897.908
		b. 12.500	102.284	1.278.554.450	2.036.850.454	758.296.004
VI.	TN Gn Leuseur	a. 0	144.159	0	347.518.625	347.518.625
		b. 2.000	80.325	160.649.773	284.654.709	124.004.936
VII.	TN Bunaken	a. 0	22.2200	0	155.975.961	155.975.961
		b. 8.000	8.859	70.870.169	105.163.169	34.742.806

Keterangan : a = harga karcis saat ini
b = harga karcis optimal
JK = jumlah kunjungan

TWTP = kesediaan membayar total
HOK = hari orang kunjungan

Sumber : Bahrni (1995).

Penelitian Susmianto (1995) di TN Gunung Gede Pangrango menunjukkan bahwa pengeluaran pengunjung dalam satu tahun sebesar Rp 613.616.248. Tabel 2 menunjukkan berbagai bentuk pengeluaran pengunjung tersebut.

Tabel 2. Pengeluaran pengunjung di TN Gunung Gede Pangrango menurut jenis pengeluaran

No	Pengeluaran		
	Rp	%	
1.	Biaya Transportasi	110.608.725	18,03
2.	Penginapan	11.470.640	1,87
3.	Makanan dan Minuman	245.140.914	39,95
4.	Lain-lain	246.395.969	40,15
Total		613.616.248	100,00

Sumber : Dihitung dari Susmianto (1995).

Gregory (1972) mengemukakan bahwa jumlah pengunjung taman nasional di Amerika Serikat terus mengalami peningkatan, yaitu dari sekitar 1 juta orang pada tahun 1920, menjadi sekitar 70 juta orang pada tahun 1960, kemudian menjadi sekitar 140 juta orang pada tahun 1960 dan meningkat menjadi 180 juta orang pada tahun 1969. Peningkatan jumlah pengunjung taman nasional ini juga terjadi di Khao Yai Nasional Park (Thailand), yaitu dari

115.675 orang pada tahun 1977 menjadi 196.730 orang pada tahun 1982 dan meningkat menjadi 401.661 orang pada tahun 1987 (NDP dalam Dixon dan Sherman, 1990).

Khao Yai National Park memberikan suatu dampak ekonomi yang besar bagi perekonomian regional. Diperkirakan pengeluaran pengunjung untuk kegiatan wisata di taman nasional ini pada tahun 1987 mencapai 100 - 200 juta Bath setahun (sekitar 3,85-7,70 juta \$US). Adapun biaya pengelolaan taman nasional tersebut sekitar 125 ribu \$US per tahun (Dixon dan Sherman, 1990).

PROSPEK PENGEMBANGAN WISATA ALAM

Memperhatikan kondisi-kondisi sebagaimana dikemukakan pada bagian di atas, yaitu :

- (1) adanya surplus konsumen yang begitu besar
- (2) tingkat pertumbuhan pengunjung taman nasional, dan
- (3) nilai ekonomi pada dampak regional dari kegiatan wisata alam yang tinggi,

maka adalah cukup beralasan bilamana kegiatan wisata alam mulai diperhitungkan sebagai sumber penerimaan, baik bagi masyarakat setempat, regional maupun nasional. Peluang pengembangan wisata alam di Indonesia semakin besar sejalan dengan semakin baiknya kondisi infrastruktur dan adanya suatu tuntutan yang semakin tinggi terhadap pelestarian lingkungan.

Khusus dalam hal pengembangan wisata alam di kawasan hutan ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih seksama. *Pertama*, organisasi atau institusi pengatur pengembangan kegiatan wisata alam masih belum memadai. *Kedua*, biaya investasi awal untuk penyelenggaraan wisata alam dan biaya tetapnya sangat tinggi. *Ketiga*, kemampuan daya beli (kemampuan membayar) penduduk Indonesia relatif belum tinggi. *Keempat*, pengelolaan wisata alam memerlukan suatu pengetahuan yang luas dalam hal ekologi dan ekosistem. *Kelima*, ada keterbatasan kemampuan menerima pengunjung untuk suatu tempat per hari kunjungan. *Keenam*, masyarakat sekitar kawasan masih belum memiliki cukup kesiapan untuk berperanserta dalam pengelolaan wisata alam.

Fungsi kawasan hutan yang begitu penting bagi kelangsungan sistem penyangga kehidupan memberikan suatu kondisi tertentu dalam pengelolaan suatu kawasan rekreasi di kawasan hutan. Untuk itu penyelenggaraan kegiatan wisata alam di kawasan hutan masih harus di bawah lingkup Departemen Kehutanan. Yang menjadi masalah adalah kemampuan di bidang wisata dari personal dan kelembagaan di bawah naungan Departemen Kehutanan masih belum dapat disetarakan dengan kemampuan Departemen Kehutanan dalam mengelola hutan produksi.

Biaya investasi awal dan biaya tetap dari kegiatan wisata alam yang besar memerlukan dukungan lembaga keuangan. Dalam hal ini sistem permodalan yang berlaku di HTI dapat diberlakukan pula untuk pengembangan wisata alam di kawasan hutan.

Daya beli/bayar penduduk Indonesia yang relatif masih belum tinggi menuntut orientasi wisatawan mancanegara sebagai sasaran pengunjung kawasan wisata alam. Untuk itu segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi kegiatan wisata harus terselenggara dan tersedia secara prima. Dengan demikian dibutuhkan suatu pendanaan yang besar disertai penyediaan tenaga terampil dan ahli di bidang pariwisata ekologi serta ekosistemnya.

Adanya *peak season* dalam kegiatan wisata, terutama pada musim liburan menuntut suatu pengaturan yang cermat dalam pengelolaan pengunjung. Hal tersebut disebabkan adanya keterbatasan daya dukung lingkungan. Sebagai contoh TW Grojogan Sewu pada saat *peak season* dapat mencapai 15.000 pengunjung sehari, padahal luas total area wisata hanya sekitar 20 ha. Artinya kepadatan pengunjung mencapai hampir sekitar 8 orang untuk luasan 10,0 m². Kondisi demikian tentu saja melewati ambang kenyamanan wisata alam dan daya dukung kawasan.

Hal yang perlu diperhatikan dengan perhatian yang lebih besar adalah peningkatan kemampuan masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan wisata alam. Bila hal ini tidak diperhatikan, maka dampak positif adanya wisata alam akan kurang terasa. Bahkan bisa saja kegiatan wisata alam itu menemui kegagalan.

PENUTUP

Pengembangan kegiatan rekreasi alam di kawasan hutan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai guna sumberdaya alam hutan. Kecenderungan pada dekade terakhir ini menunjukkan suatu tanda positif dalam pengembangan kegiatan wisata alam.

Beberapa studi menunjukkan bahwa kegiatan wisata alam semakin meningkat, baik dari jumlah pengunjung, penerimaan pengelola, nilai ekonomi, maupun jenis atraksi wisata alam. Dengan demikian pengembangan wisata alam memiliki suatu prospek yang cerah.

Adanya alternatif pengembangan rekreasi alam memberikan dampak positif, terutama terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar serta pengurangan tekanan terhadap kawasan hutan. Indonesia dalam masa mendatang tidak harus terlalu mengandalkan diri pada hasil hutan kayu yang akhir-akhir ini mengalami berbagai sorotan karena terjadinya deforestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrani. 1995. Permintaan dan Manfaat Wisata Alam Kawasan Konservasi. Makalah pada Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol. I No. 1 : 23 - 31 (1995). Jurusan Manajemen Hutan - Fakultas Kehutanan IPB, Bogor.
- Clawson, M. and J.L. Knetsch. 1966. *Economics of Outdoor Recreation*. The Johns Hopkins Press, Baltimore.
- Darusman, D. 1995. Nilai Ekonomi Air untuk Pertanian dan Rumah tangga. Makalah pada Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol. I : No. 1 - 12 (1995). Jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, Bogor
- Departemen Kehutanan. 1994. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan 1994/1995 - 2019/2020. Rapat Kerja Nasional Departemen Kehutanan Tahun 1994, Jakarta.
- Departemen Kehutanan. 1994. Rencana Pembangunan Kehutanan Pelita VI. Rapat Kerja Nasional Departemen Kehutanan Tahun 1994, Jakarta.
- Gregory, G.R. 1972. *Forest Resource Economics*. The Ronald Press Company, New York.
- Gunn, C.A. 1993. *Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases. Third Edition*. Taylor & Francis Ltd, Washington.
- Susmianto, A. 1995. Recreational Expenditures in Gede Pangrango National Park and Their Regional Economic Impacts. A Thesis Submitted to Michigan State University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science. Department of Forestry - Michigan State University, Michigan. (Unpublished).